

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan, badan usaha, organisasi dan lembaga-lembaga pemerintahan sekalipun, menempatkan laporan keuangan sebagai pelaporan data yang memuat informasi keuangan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan pihak internal maupun eksternal. Walaupun dalam upaya penyusunan laporan keuangan hanya dalam bentuk yang sederhana mungkin. Dalam instansi-instansi pemerintah semua laporan keuangan yang dibuat harus mempunyai bentuk yang sesuai dengan standar akuntansi publik yang telah ditetapkan. Mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah semua bentuk pelaporan telah ditetapkan.

Beberapa prioritas perbaikan dari pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan, terutama dalam aspek akuntansi, anggaran, dan pemeriksaan. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola sistem dana secara efisien, efektif dan transparan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas. Untuk itu diperlukan suatu pemikiran cerdas melalui inovasi sistem akuntansi untuk mewujudkan hal tersebut.

Akuntansi merupakan suatu sistem pengukuran dan sistem komunikasi yang dapat memberikan informasi ekonomi dan sosial pada suatu entitas atau perusahaan yang dapat diidentifikasi sehingga memungkinkan pemakai untuk membuat pertimbangan dan juga keputusan yang jelas dan tegas mengenai alokasi sumber daya yang optimal dan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Penyusunan suatu sistem haruslah didasarkan pada tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Sistem akuntansi disusun dengan tujuan untuk menghasilkan

laporan keuangan berupa neraca, laporan arus kas, laporan kinerja keuangan atau laporan surplus/deficit dan laporan perhitungan anggaran. Indra Bastian (2006 : 30)

Akuntansi dalam berbagai kesatuan ekonomi seperti akuntansi perusahaan dan akuntansi pemerintahan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk penyedia informasi keuangan yang cermat, lengkap, dan tepat waktu.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi yang bermacam-macam dan rumit pada kelompok diatas, akuntansi pemerintah juga menggunakan konsep akuntansi, praktek-praktek, konvensi, konvensi, dan prosedur-prosedur yang dipakai oleh akuntansi perusahaan.

Akuntansi pemerintahan maupun pada akuntansi perusahaan menggunakan siklus akuntansi yang sama, keduanya menggunakan istilah yang sama seperti buku harian (jurnal), buku besar, laporan keuangan dan lain-lain.

Pada akuntansi pemerintahan data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi keuangan dan ekonomi yang menyangkut organisasi pemerintah dan organisasi lain yang tidak bertujuan dalam mencari laba, melainkan melayani masyarakat dalam urusan dengan pemerintah.

Dalam akuntansi pemerintahan seperti halnya pada akuntansi perusahaan, proses akuntansi dimulai dengan analisa dan pengakuan dokumen transaksi yang utama, kemudian diikuti dengan pencatatan kedalam buku harian atau jurnal dan pencatatan-pencatatan kedalam buku besar serta buku tambahannya. Dari pencatatan yang sudah dilakukan akan diringkaskan untuk menyusun laporan keuangan.

Kegiatan-kegiatan pemerintah umumnya tidak ditujukan untuk mencari laba sebagaimana halnya pada kegiatan-kegiatan perusahaan. Pemerintah melayani kepentingan

keamanan, kesejahteraan dan manfaat-manfaat umum lainnya pada seluruh masyarakat.

Dalam hubungan dengan pekerjaan perbaikan atau penyusunan sistem akuntansi, dalam hal ini bagian keuangan daerah bertanggung jawab untuk selalu menindak lanjuti atau mengecek jalannya sistem akuntansi. Pengecekan ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem dan keluaran sesuai dengan kebutuhan informasi.

Sistem akuntansi harus sesuai dengan organisasi tertentu, beragam faktor yaitu hakekat dan tujuan organisasi, karakteristik struktural dan fungsionalnya, tata letak fisiknya, produk dan jasanya Indra Bastian (2006). Sistem akuntansi berjalan dan personal adalah yang menjalankan sistem, seluruhnya relevan sebagai pertimbangan. Tujuan dasar sistem akuntansi adalah untuk mencatat, memproses, mengidentifikasi dan melaporkan informasi keuangan.

Kas yang berguna sebagai alat pembayaran likuid harus di kelola dengan baik agar terhindar dari penyelewengan dan penyimpangan. Penyelewengan dan penyimpangan kas dapat dihindari dengan suatu sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang baik. Kas juga dapat dengan mudah di pindah tangankan dan tidak dapat di buktikan kepemilikinya, sehingga kas sangat mudah di selewengkan. Dengan adanya suatu sistem informasi dan pengendalian intern yang memuaskan, maka hal-hal yang merugikan perusahaan dapat diminimalisasi dan dihindari.

Baik kas pada instansi pemerintah maupun organisasi swasta sama-sama dijadikan sebagai dana yang di perlukan untuk kepentingan organisasi tersebut. Perbedaannya terletak pada prosedur penerimaan kas dan pengeluaran kasnya.

Pada instansi pemerintah kas yang di dapat dari anggaran pemerintah provinsi atau dari penjualan aset daerah yang diterima oleh bendahara penerimaan dan dilanjutkan dengan

penyusunan rencana kerja atau renja tahunan. Dari kegiatan yang diajukan baru dibuat anggaran yang dilanjutkan dengan pengeluaran dana yang di butuhkan oleh bendahara pengeluaran.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang merupakan badan yang mempunyai kegiatan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan keimigrasian. Sehingga dalam kegiatannya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang melakukan sistem akuntansi, salah satunya yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas. Pengeluaran kas merupakan suatu informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan untuk pengambilan suatu keputusan-keputusan ekonomi agar dapat mencapai hasil yang optimal dan diinginkan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pengeluaran kas dalam sebuah laporan yang berjudul **“Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dikemukakan permasalahan yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, **Bagaimana Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.**

1.3 Tujuan dan Manfaat Kegiatan Magang

A. Tujuan Penulisan

Dalam melakukan penulisan ini, ada beberapa tujuan yang menjadi objek, diantaranya adalah:

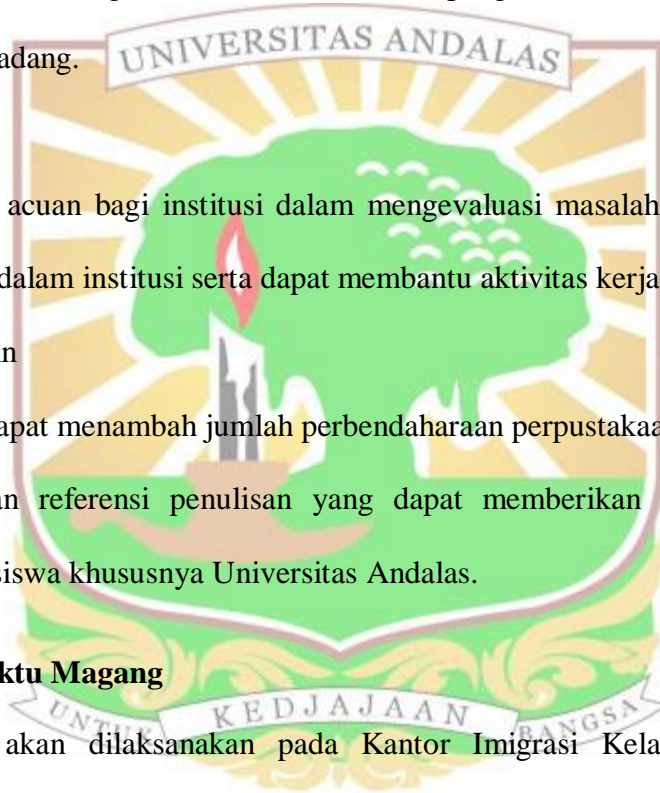
1. Untuk memahami lebih jauh lagi teori yang didapat dalam perkuliahan dengan melihat penerapannya yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

2. Untuk mengetahui sistem akuntansi pengeluaran kas pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

B. Manfaat Kegiatan Magang

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja serta mengaplikasikan teori yang di dapat penulis dengan implementasinya di dunia kerja.
 - b. Untuk mengetahui bagaimanasistem akuntansi pengeluaran kas pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.
2. Bagi Institusi

Bisa menjadi acuan bagi institusi dalam mengevaluasi masalah dan kekurangan yang mungkin ada dalam institusi serta dapat membantu aktivitas kerja dalam institusi.
3. Bagi pihak lain
 - a. Diharapkan dapat menambah jumlah perbendaharaan perpustakaan.
 - b. Sebagai bahan referensi penulisan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa khususnya Universitas Andalas.



1.4 Tempat dan Waktu Magang

Magang ini akan dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang yang berlangsung 8 minggu, dimulai dari 17 Januari 2022 s/d 16 Maret 2022. Hari kerja senin s/d jum'at.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penulisan Laporan Kerja Praktek ini adalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT.

03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Padang Utara. Berikut yang merupakan teknik pengambilan data yang penulis lakukan:

a. Wawancara

Yaitu dengan cara berdialog langsung dengan bendahara pengeluaran dan beberapa pegawai yang ada di bidang keuangan yang menangani pengeluaran kas yang juga mengawasi jalannya semua prosedur pencatatan pengeluaran kas.

b. Dokumentasi data

Yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan fotokopi data yang didapat dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

1.6 Analisa Data

Untuk menganalisa data penulis ini, peneliti menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu menggambarkan dan membandingkan suatu keadaan dengan menganalisa dan mengevaluasi data tersebut berdasarkan teori dengan yang terjadi di lapangan hingga diambil suatu kesimpulan.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan

Penulisan Proposal Magang “Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang” terdiri dari V (lima) Bab, dimana sistematika penulisannya terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, waktu dan pelaksanaan magang, dan sistematika penulisan.



BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi penjelasan teori mengenai tinjauan pustaka yang membahas teori-teori yang menguraikan secara detil mengenai pengertian system, akuntansi, sistem dan prosedur, sistem akuntansi, kas, pengeluaran kas, system pengendalian internal dan sebagainya.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Merupakan gambaran umum instansi yang terdiri dari sejarah berdirinya instansi, peta instansi, kondisi instansi, visi misi instansi, dan struktur instansi.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yaitu mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas pada Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

BAB V : PENUTUP

Merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran tentang kegiatan magang yang penulis lakukan.

